

**PRAKTEK AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DAN KESESUAIAN PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI KSPPS FASTABIQ KHOIRO UMMAH
DENGAN FATWA DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

**MAULIDA RAHMA JATININGTYAS
I000150016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

**PRAKTEK AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN KESESUAIAN
PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS
FASTABIQ KHOIRO UMMAH DENGAN FATWA DSN MUI
NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

HALAMAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh

Maulida Rahma Jatiningtyas

NIM: I000150016

NIRM: 15/X/02.2.1/0315

Telah diperiksa dan di setujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Harun M.H
NIDN. 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTEK AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN KESESUAIAN
PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS
FASTABIQ KHOIRO UMMAH DENGAN FATWA DSN MUI NO. 08/DSN-
MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

Oleh

Maulida Rahma Jatiningtyas

NIM: I000150016

NIRM: 15/X/02.2.1/0315

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Kamis Tanggal 22 April 2021


dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

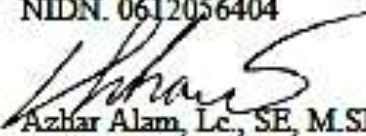
1. Penguji I


Drs. Hayun, M.H.
NIDN. 0605083701

2. Penguji II


Yayuli, S.Ag, MPI
NIDN. 0612056404

3. Penguji III


Azhar Alam, Lc., SE, M.SEI
NIDN. 0613109801

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dekan Fakultas Agama Islam


Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag
NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 1 Maret 2021

Penulis



Maulida Rahma Jatiningtyas

**PRAKTEK AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DAN KESESUAIAN PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI KSPPS FASTABIQ KHOIRO UMMAH
DENGAN FATWA DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

Abstrak

Maulida Rahma Jatiningtyas, NIM I000150016, “Praktek Akad Pembiayaan Musyarakah dan Kesesuaian Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah”, Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Koperasi syariah adalah usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan pada prinsip pembiayaan secara syariah. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Fastabiq Khoiro Ummah. KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah adalah lembaga keuangan syariah yang cukup lama berdiri dan telah memiliki banyak cabang ditingkat provinsi Jawa Tengah yang memiliki produk unggulan yang banyak di minati oleh nasabah yaitu akad Musyarakah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui praktek akad pembiayaan Musyarakah dan kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder yang didapatkan dari observasi dan dokumentasi serta wawancara. Kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa (1) praktek akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah meliputi modal dalam akad pembiayaan Musyarakah berupa uang tunai, penentuan bagi hasil akad pembiayaan Musyarakah yang terjadi di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah mensyaratkan adanya jaminan atas akad pembiayaan Musyarakah, akad pembiayaan Musyarakah yang dilaksanakan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah termasuk jenis syirkah inan (2) ijab qabul, para pihak yang melakukan kontrak, modal, kerja dan keuntungan pada akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Kata Kunci: fatwa dsn mui, akad musyarakah dan kspps fastabiq khoiro ummah

Absract

Maulida Rahma Jatiningtyas, NIM I000150016, “Practice of Musyarakah Financing Contracts and Compliance with DSN MUI Fatwa No. 08/DSN-

MUI/IV/2000 on Sharia Financing Contracts at KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah”, Faculty of Islamic Religion, Sharia Economic Law Study Program, Muhammadiyah University of Surakarta. A sharia cooperative is a business consisting of people or cooperative legal entities based on sharia financing principles. One of them is the Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS) Fastabiq Khoiro Ummah. KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah is a sharia financial institution that has been around for a long time and has had many branches at the Central Java provincial level which has superior products that are in great demand by members, namely Musyarakah contracts. This study aims to determine the practice of Musyarakah financing contracts at KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah and the suitability of the DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 on Musyarakah financing contracts at KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah. This research is a qualitative research with a sociological juridical research approach. The data collection method used primary and secondary data sources obtained from documentation and interviews. Then analyzed using qualitative analysis methods with inductive thinking. Based on the results of the study, it can be concluded that (1) the practice of Musyarakah financing at KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah includes capital in the Musyarakah financing contract in the form of cash, determination of profit sharing for Musyarakah financing contracts that occur in KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah requires a guarantee for Musyarakah financing contracts, Musyarakah financing contracts carried out at KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah are included in the type of syirkah inan. (2) ijab qabul, contracting parties, capital, work and profits on Musyarakah financing at KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah are in accordance with the provisions of DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Keywords: religious advices of dsn mui, musyarakah akkad, kspps fastabiq khoiro ummah

1. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntunan syariah yang menjadi landasan dari keseluruhan lembaga keuangan syariah. Penerapannya dengan pelayanan yang berbasis moral dan spiritual. Lembaga keuangan memiliki peran yang berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan rakyat industri modern. Lembaga keuangan difungsikan masyarakat untuk melakukan kredit dan menabung. Oleh karena itu, lembaga keuangan memiliki peran besar dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi warga meski tidak sepenuhnya mewakili kepentingan secara luas.

Pada sistem keuangan Islam terdapat beberapa organisasi keuangan bukan bank yang memiliki peran hampir sama. Letak perbedaannya terdapat pada sistem dan mekanisme operasional. Dengan dihapuskannya prinsip bunga, praktek sistem bebas bunga tetap menerapkan sistem bagi hasil secara integral untuk menjadikannya lebih mudah.

Lembaga keuangan syariah sebagai solusi alternatif dalam melestarikan syariat Islam yang didalamnya terkandung konsep *hifdz al-maal* yang merupakan prinsip ajaran Islam. Selain itu, lembaga keuangan syariah sebagai solusi dalam menghadapi persoalan mengenai pertentangan antara bunga bank dan riba.

Selain bank syariah masih terdapat banyak lagi lembaga keuangan bukan bank yang melaksanakan konsep pembiayaan syariah dalam menerima dan menyalurkan dana dari masyarakat melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang lebih dikenal dengan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

Koperasi syariah adalah usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan pada prinsip pembiayaan secara syariah. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Fastabiq Khoiro Ummah.

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah adalah lembaga keuangan syariah yang cukup lama berdiri dan telah memiliki banyak cabang ditingkat provinsi Jawa Tengah yang memiliki produk unggulan yang banyak di minati oleh nasabah yaitu akad Musyarakah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Fastabiq Khoiro Ummah merupakan KSPPS di kota Pati yang mempunyai visi menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang unggul dan terpercaya.

Pada pembiayaan Musyarakah, akad yang terjadi ialah penyertaan modal yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mencantumkan modal usaha sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya modal kembali kepada masing-masing pihak setelah jatuh tempo dengan cara mengangsur harian, mingguan, bulanan dan tahunan sesuai akad yang telah ditentukan dan di sepakati oleh kedua belah pihak. Apabila terdapat kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dan nasabah.

Dalam akad pembiayaan Musyarakah di lembaga keuangan syariah terdapat beberapa ketentuan mengenai rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah berkaitan dengan akad pembiayaan, pihak-pihak yang melakukan pembiayaan dan penanggung risiko. Praktek tersebut seringkali tidak sejalan dengan sebagaimana mestinya seperti yang terdapat dalam pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Fastabiq Khoiro Ummah.

Persyaratan umum pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yaitu pihak pertama yang ingin melakukan pembiayaan harus resmi menjadi nasabah KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah. Jika syarat-syarat sudah terpenuhi, maka nasabah yang mengajukan pinjaman diberikan formulir pembiayaan untuk di isi secara lengkap.

Masalah muncul dalam peraturan yang berkaitan dengan akad pembiayaan Musyarakah yaitu pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dalam melakukan kontrak perjanjian yang berbunyi bahwa segala risiko perjalanan usaha ditanggung oleh nasabah atau pihak kedua. Pada dasarnya KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah hanya menyalurkan dana untuk membantu memecahkan permasalahan ekonomi masyarakat, namun demikian apakah prakteknya sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah atau belum. Dengan adanya praktek akad pembiayaan Musyarakah yang terkadang memberatkan nasabah KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah tentunya akan menyebabkan adanya keraguan umat Islam terhadap keyakinan pada prinsip-prinsip syariah terkait pembiayaan yang terdapat dalam akad pembiayaan Musyarakah.

Peneliti menggunakan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan Musyarakah sebagai tinjauan dasar dalam penelitian ini. Fatwa merupakan putusan perkara dalam agama Islam oleh alim ulama terkait suatu masalah. Peran penting dikeluarkannya Fatwa yakni para ulama mengerti tentang hal syariat, dalam hal ini mengenai hukum muamalah. Menurut Fatwa DSN MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Sesuai dengan uraian dari permasalahan yang telah disebutkan, maka peneliti akan melakukan penelitian yang membahas tentang akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah melalui penelitian yang berjudul **"Praktek Akad Pembiayaan Musyarakah dan Kesesuaian Pelaksanaan akad Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah"**.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang di peroleh secara langsung dari responden. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi yang dijadikan penelitian yaitu KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yang terletak di Jl. Pati-Tayu Km. 3 Tambaharjo, Pati. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktek Akad Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

Diantara beberapa jenis muamalah terdapat salah satu akad transaksi yang dikenal dengan Musyarakah. Musyarakah adalah akad antar dua orang atau lebih dalam menyertakan modal dengan keuntungan dibagi untuk sesama mereka sesuai porsi yang telah di tentukan. Musyarakah lebih dikenal dengan sebutan syirkah merupakan gabungan para pemegang saham untuk membiayai usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi menurut presentase yang telah di tentukan dan disepakati. Apabila usaha mengalami kerugian, maka beban kerugian ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proporsional.

Musyarakah merupakan salah satu bentuk bagi hasil yang dilakukan dengan sistem perbankan syariah. Prinsip yang digunakan ini sebagai salah satu dasar dalam menyalurkan dana atau pembiayaan. Sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa akad pembiayaan Musyarakah adalah kesepakatan antara lembaga keuangan dengan nasabah untuk membiayai usaha di

mana lembaga keuangan dan nasabah secara bersama-sama menyediakan dana dan ikut serta dalam melakukan pekerjaan.

Salah satu penyaluran dana (pembiayaan) di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah menggunakan akad Musyarakah. Modal dalam akad pembiayaan Musyarakah berupa uang tunai yang digunakan untuk mengembangkan usaha kemudian modal dan usaha tersebut di jadikan satu. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal II Ayat I bahwa akad pembiayaan Musyarakah tersebut benar-benar hanya digunakan untuk membiayai modal kerja. Jadi, antara KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan nasabah sama-sama memiliki karena pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah juga melakukan pengawasan dan memberikan motivasi untuk kemajuan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini telah memenuhi syarat-syarat modal Musyarakah, yaitu:

1. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama
2. Modal dapat berupa aset perdagangan
3. Modal yang disertakan oleh masing-masing perseroan di jadikan satu yakni sebagai harta perseroan

Penentuan bagi hasil akad pembiayaan Musyarakah yang terjadi di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dilakukan pada saat pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dan nasabah melakukan kesepakatan yaitu pada waktu melakukan akad pembiayaan Musyarakah. Dalam akad pembiayaan Musyarakah dijelaskan bahwa keuntungan masing-masing pihak mendapatkan 20 % untuk pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dan 80 % untuk pihak anggota.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal III Ayat 3 dalam akad pembiayaan Musyarakah bahwa nasabah yang memperoleh pembiayaan wajib mengembalikan modal ditambah dengan bagi hasil selama waktu tertentu (misalnya 36 bulan). Modal dikembalikan dalam jumlah yang sama pada setiap bulan namun bagi hasil di berikan pada tiap bulan dalam jumlah yang tidak sama (sesuai dengan besar kecilnya keuntungan bersih usaha). Sehingga masing-masing pihak terhindar dari riba.

Demi keamanan pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, maka KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah mensyaratkan adanya jaminan atas akad pembiayaan Musyarakah. Hal ini sesuai dalam Pasal IV akad pembiayaan Musyarakah bahwa nasabah memperoleh akad pembiayaan wajib menyertakan jaminan. Jaminan berfungsi ketika nasabah mengalami kepailitan dan nilai jaminan menjadi milik lembaga keuangan (KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah). Dengan tujuan untuk menjamin kejadian yang tidak diinginkan, ketika pihak membutuhkan dana untuk melakukan penyimpangan. Jaminan hanya diberikan apabila pihak yang membutuhkan dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah di sepakati bersama dalam akad.

Berdasarkan penjelasan diatas dan teori akad pembiayaan Musyarakah yang penulis jelaskan dalam bab sebelumnya. Dengan bukti bahwa modal berupa uang tunai dan nisbah bagi hasil diambil dari penghasilan harta akad pembiayaan Musyarakah tidak dari harta lain.

Akad pembiayaan Musyarakah yang dilaksanakan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah termasuk jenis syirkah inan. Dimana KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dan nasabah secara bersama-sama melakukan serikat dalam hal modal serta keuntungan, tidak mensyaratkan adanya kesamaan modal dan keuntungan serta pertanggungjawaban sesuai dengan besaran modal.

3.2 Kesesuaian Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Setelah melakukan pengamatan terhadap praktek akad pembiayaan Musyarakah, peneliti kemudian mengumpulkan data yang ada berdasarkan observasi dan wawancara serta dokumentasi di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, telah menjabarkan tentang bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah diatas. Selain pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang akad Musyarakah. Kesesuaian implementasi pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq

Khoiro Ummah menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:

3.2.1 Akad (ijab dan qabul)

Ijab qabul atau akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, dimana ijab dan qabul di lakukan penawaran terlebih dahulu dan hasil dari penawaran terhadap perjanjian akad pembiayaan Musyarakah yang telah disepakati oleh kedua pihak baik pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah serta pihak nasabah yang akan melanjutkan dengan akad pembiayaan tertulis.

Kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dibuktikan dengan adanya perjanjian secara eksplisit yang di tuangkan pada akad pembiayaan Musyarakah KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, dimana kedua belah pihak yang melakukan kerjasama atau syirkah yang dalam kedudukannya masing-masing telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama modal usaha (Musyarakah) yang terikat dalam akad. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yakni kedua belah pihak menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Kesesuaian lain dari akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 yakni penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit sesuai dengan tujuan kontrak (akad) serta penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontak. Dari hasil observasi, terdapat surat perjanjian kerjasama (akad) pembiayaan Musyarakah dan wawancara dengan general manager KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, diketahui bahwa kedua hal terkait di atas sudah selesai dan dilakukan dalam prosedur pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yang tertuang dalam akad pembiayaan Musyarakah KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah.

Begitu pula dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa “akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern”. Dalam pelaksanaan

akad pembiayaan Musyarakah yang ada di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah juga telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini dibuktikan dengan adanya akad yang dituangkan secara tertulis dalam akad (MSA) No. XII/505 dimana pelaksanaannya dilakukan melalui korespondensi antar KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yang diwakili oleh bagian pembiayaan dan nasabah.

3.2.2 Pihak yang Melakukan Kontrak

Pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dilakukan oleh dua pihak yaitu Pihak I sebagai pemilik dana (KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah) dan Pihak II sebagai pemilik dana sekaligus pelaksana usaha (nasabah). Berdasarkan observasi yang dilakukan terkait persyaratan pihak-pihak yang melakukan kontrak dalam akad pembiayaan Musyarakah tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang pihak-pihak yang melakukan kontrak terdapat ketentuan bahwa “ pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum” artinya pihak-pihak yang berkontrak paling tidak harus memiliki pengetahuan dasar tentang hukum perjanjian. Pada kenyataannya tidak semua nasabah memiliki pengetahuan dasar hukum tentang perjanjian sehingga tidak semua nasabah memiliki kemampuan cakap hukum. Namun, pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah berusaha menjelaskan mengenai alur pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah, hukum dan ketentuan akad serta hal-hal terkait dengan akad pembiayaan Musyarakah dengan cara komunikatif.

Selain persyaratan cakap hukum, menurut hasil observasi dan beberapa pasal yang terdapat dalam akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah mengenai persyaratan pihak-pihak yang melakukan serikat dalam akad pembiayaan Musyarakah, hal tersebut telah relevan dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi “kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan” dan “setiap mitra harus menyediakan dana serta pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil” dapat dilihat dari pihak-pihak yang melakukan kontrak yaitu Pihak I memberikan wewenang kepada Pihak II

untuk mengelola dana dalam melakukan pengembangan usaha Pihak II. Pihak II diberikan kekuasaan atau wewenang sebagai perwakilan atau nasabah Pihak I dalam mengelola dana.

3.2.3 Obyek Akad

Obyek akad pembiayaan Musyarakah yakni modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Kesesuaian obyek akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan sebagai berikut:

3.2.3.1 Modal

Modal yang diberikan harus berupa uang tunai dan aset perniagaan seperti properti, barang, perlengkapan dan sebagainya. Dalam realisasi akad pembiayaan Musyarakah, modal yang diperoleh dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah di cantumkan dalam formulir pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah bahwa modal yang diberikan oleh pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah berupa uang tunai. Jaminan yang digunakan meliputi BPKB mobil, BPKB motor dan sertifikat tanah.

Modal yang diberikan dalam obyek akad sebagaimana di jelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi “modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama”. Dari wawancara yang dilakukan kepada nasabah, diketahui telah relevan dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu modal yang diberikan berupa uang tunai untuk membantu mengembangkan usaha dan memotivasi nasabah dalam hal pekerjaan.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi “para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal Musyarakah kepada pihak lain melainkan atas dasar kesepakatan”. Hal ini sudah sinkron dengan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yang mana modal diberikan kepada nasabah benar-benar di gunakan untuk mengembangkan usaha, tidak untuk keperluan yang bersifat pribadi.

Prinsip akad pembiayaan Musyarakah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa akad pembiayaan Musyarakah tidak terdapat adanya jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah meminta adanya jaminan. KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah selaku pihak yang memberikan pembiayaan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Penulis menyimpulkan bahwa hal ini telah relevan dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan modal usaha.

3.2.3.2 Kerja

Kerja merupakan partisipasi nasabah dalam melakukan usaha dalam melakukan akad pembiayaan Musyarakah. Pelaksana kerja yakni nasabah dan pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah hanya memantau usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketentuan yang berbunyi “partisipasi para mitra dalam hal pekerjaan merupakan dasar dari pelaksanaan pembiayaan Musyarakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Nasabah dapat melakukan kerja lebih dari yang ditentukan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa pihak nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah sebagai rekan usaha dan dapat ikut serta dalam mengelola usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang ditentukan meliputi pengawasan, review, meminta bukti laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah pada setiap bulan sesuai dengan bukti pendukung yang dapat di pertanggungjawabkan.

Hal tersebut sinkron dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang dijelaskan dalam akad pembiayaan Musyarakah (MSA) Pasal II No 6 dan 7 yang berbunyi “pihak I melakukan pembinaan dan pengawasan usaha yang dikelola oleh pihak II” dan “pihak II berkewajiban untuk memberikan laporan atas usaha setiap bulan kepada pihak I secara jujur dan benar”. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah akad pembiayaan Musyarakah membuktikan bahwa dalam pembinaan dan pengawasan harus dilakukan oleh pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, maka pihak nasabah harus bersedia untuk memberikan keterangan kepada pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah mengenai

usaha dan memberikan kesempatan kepada pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah untuk memeriksa kelancaran usaha yang di jalankan.

3.2.3.3 Keuntungan

Sistem keuntungan dalam akad pembiayaan Musyarakah dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal akad. Sebelum melakukan akad atau kesepakatan dengan nasabah pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah terlebih dahulu menetapkan adanya nisbah bagi hasil sehingga penentuan nisbah atau presentase ditentukan dengan kemampuan nasabah. Penentuan nisbah ini berlaku untuk menentukan bagi hasil dalam akad pembiayaan Musyarakah.

Keuntungan atau bagi hasil akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah telah diatur dalam akad pembiayaan Musyarakah yang tertera dalam Pasal II No 3 yang berbunyi “kedua belah pihak sepakat untuk membagi hasil pendapatan dengan nisbah yaitu 20 % untuk pihak I dan 80 % untuk pihak II”. Dari hasil wawancara yang dilakukan, telah relevan dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Musyarakah yang menyebutkan bahwa keuntungan tidak ditentukan dalam bentuk nominal dan harus di bagikan secara proporsional atas dasar keseluruhan keuntungan dan tidak terdapat jumlah yang ditentukan di awal serta pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

3.2.3.4 Kerugian

Pembagian kerugian yang terdapat dalam akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah terdapat dalam Pasal II No 8 yang berbunyi “Sebagai konsekuensi dari akad Musyarakah, maka pihak I hanya menanggung kerugian yang benar-benar dibuktikan karena risiko usaha dan tidak menanggung kerugian yang di akibatkan oleh kesalahan yang disengaja atau karena kecerobohan serta kelalaian karena menyalahi perjanjian”.

Berdasarkan wawancara dengan pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dan nasabah, apabila terjadi kerugian dalam usaha yang telah ditentukan dan di kelola karena kelalaian pihak nasabah, maka kerugian ditanggung oleh pihak nasabah. Jika tidak dapat melunasi kerugian, selanjutnya akan dilakukan musyawarah.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terkait Musyarakah telah dijelaskan pada No 3 Poin 4 bahwa kerugian harus di bagi antar nasabah secara proporsional menurut saham masing-masing yang tertera dalam modal. Terkait dengan hasil wawancara tersebut, hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang tertera pada No 3 Poin 4.

3.2.4 Biaya Operasional dan Persengketaan

Biaya operasional tergantung pada akad yang telah disepakati bersama. Apabila berupa uang, biaya operasional menjadi beban bersama. Jika dalam bentuk aset, maka beban operasional menjadi tanggung jawab nasabah. Dalam akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah tercantum dan dirinci pada Pasal 3 mengenai biaya-biaya yang di bayarkan oleh pihak nasabah dan harus dibayarkan di muka. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, hal tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang tertera dalam ketentuan No 4 bahwa biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

Dalam hal persengketaan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada No 4 Poin 2 yang berbunyi “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antar para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai adanya kesepakatan melalui musyawarah.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah belum sesuai dengan kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terkait pembiayaan Musyarakah yang mengatur tentang biaya operasional yang tercantum dalam akad bahwa biaya operasional ditanggung bersama oleh nasabah dan harus di bayarkan dimuka.

3.3 Ketentuan Lain dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang Sudah Sesuai

Sesuai dengan pelaksanaannya yang berbunyi ”setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset Musyarakah dalam proses bisnis normal” dan “setiap mitra memberi wewenang untuk melakukan aktifitas Musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitra tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang

disengaja”. Kedua ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 ini tercantum dalam akad Musyarakah (MSA) di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yakni pada Pasal II Nomor 4, 5, 6 dan 7.

Dalam akad pembiayaan Musyarakah yang berlaku di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, terdapat pada Pasal II No 4 yang berbunyi “pihak II (dua) berhak untuk melakukan segala hal mengenai usahanya itu sesuai dengan ketentuan syar’i”. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa tiap nasabah berhak untuk mengatur aset Musyarakah dalam proses bisnis normal. Dalam Pasal II No 5 yang berbunyi “pihak I (satu) tidak ikut serta dalam mengelola manajemen usaha”, hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan mengindikasikan bahwa nasabah (dalam hal ini Pihak I yaitu KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah) memberi wewenang kepada nasabah untuk mengelola aset serta melakukan kegiatan akad pembiayaan Musyarakah. Dalam Pasal II No 6 dan 7 yang berbunyi “pihak I (satu) melakukan pembinaan dan pengawasan usaha yang dikelola oleh pihak II (dua)” serta “pihak II (dua) berkewajiban untuk memberikan laporan atas usahanya itu setiap bulan kepada pihak I secara jujur dan benar”. Kedua jenis akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah telah sinkron dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yakni nasabah memberi dan diberi wewenang untuk mengelola aset serta melakukan kegiatan akad pembiayaan Musyarakah dengan memperhatikan kepentingan nasabah tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang di sengaja yaitu dengan memberikan pengawasan serta pembinaan yang dilakukan oleh Pihak I (KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah) dan melaporkan laporan usaha yang di lakukan oleh pihak II (nasabah) agar tidak terjadi kelalaian serta kesalahan dan memperhatikan kepentingan nasabah yang lain (pemberi dana yakni KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah).

Ketentuan lain dalam pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat dalam Pasal II No 1 yang berbunyi “pembiayaan tersebut benar-benar hanya digunakan untuk membiayai modal usaha bagi pihak II berupa...(nama atau jenis usaha nasabah)”. Ketentuan tersebut sesuai dengan

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi “seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri”. Hal tersebut tertuang secara jelas dalam akad pembiayaan Musyarakah bahwa pembiayaan tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai modal usaha.

4. PENUTUP

4.1 Praktek Akad Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan di deskripsikan pada bab sebelumnya bahwa praktek akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah adalah sebagai berikut:

- a. Modal dalam akad pembiayaan Musyarakah berupa uang tunai yang digunakan untuk mengembangkan usaha, kemudian modal dan usaha di jadikan satu.
- b. Penentuan bagi hasil akad pembiayaan Musyarakah yang terjadi di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dilakukan pada saat pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dan nasabah melakukan kesepakatan yakni pada waktu melakukan akad pembiayaan Musyarakah sebesar 20 % untuk Pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dan Pihak nasabah memperoleh 80 % yang di jelaskan dalam akad.
- c. Demi keamanan pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, maka KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah mensyaratkan adanya jaminan atas akad pembiayaan Musyarakah tersebut.
- d. Akad pembiayaan Musyarakah yang dilaksanakan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah termasuk jenis syirkah inan.

4.2 Kesesuaian Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Beberapa hasil penelitian, peneliti mendapatkan kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Akad (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul atau akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, dimana ijab dan qabul yang dilakukan terdapat adanya penawaran dan hasil penawaran dari pembiayaan sudah ditetapkan bersama dan di bagi antar dua belah pihak, baik pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah serta pihak nasabah dan dilanjutkan dengan akad kontrak pembiayaan tertulis.

b. Para Pihak yang Melakukan Kontrak

Pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu Pihak I sebagai pemilik dana (KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah) dan Pihak II sebagai pemilik dana dan pelaksana usaha (nasabah). Berdasarkan observasi yang dilakukan terkait persyaratan pihak-pihak yang melakukan kontrak atau yang melakukan kerjasama Musyarakah, sudah relevan dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

c. Obyek Akad

1) Modal

Dalam realisasi akad pembiayaan Musyarakah terdapat modal yang diperoleh dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dan di cantumkan dalam formulir pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan nasabah, bahwa modal yang diberikan oleh pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah berupa uang tunai. Jaminan yang digunakan antara lain BPKB mobil, BPKB motor dan sertifikat tanah.

2) Kerja

Dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketentuan mengenai partisipasi nasabah dalam melakukan pekerjaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa pihak nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah sebagai rekan usaha serta diperbolehkan berpartisipasi dalam mengelola usaha berdasarkan kesepakatan nasabah meliputi pelaksanaan pengawasan,

membuat dan meminta ulasan serta laporan hasil pengelolaan usaha yang dibuat nasabah pada tiap bulan sesuai dengan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

3) Keuntungan

Keuntungan pada KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah juga telah diatur dalam akad pembiayaan Musyarakah yang tertera pada Pasal II No 3. Berdasarkan observasi yang dilakukan terkait akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, hal ini sudah relevan dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa keuntungan tidak ditentukan dalam bentuk nominal yang terbagi secara proporsional berdasarkan keuntungan keseluruhan dan ketentuan jumlah di awal tidak disebutkan serta pembagian keuntungan harus di jelaskan dalam akad pembiayaan Musyarakah.

4) Kerugian

Dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dijadikan terkait akad pembiayaan Musyarakah yang di jelaskan pada Pasal III Poin 4 bahwa nasabah membagi secara proporsional modal saham yang dimiliki ketika mengalami kerugian. Terkait dengan hasil wawancara dan observasi terhadap akad pembiayaan Musyarakah, penerapan tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang tertera dalam Pasal II Poin 4.

d. Biaya operasional dan persengketaan

- 1) Pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terkait akad pembiayaan Musyarakah yang mengatur biaya operasional yang tercantum dalam surat perjanjian (akad), bahwa biaya operasional ditanggung oleh nasabah yang di bayarkan dimuka.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya di lakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui adanya musyawarah.

- e. Ketentuan Lain dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang Sudah Sesuai

Sesuai dengan pelaksanaannya yang berbunyi "setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset Musyarakah dalam proses bisnis normal" dan "setiap mitra memberi wewenang untuk melakukan aktifitas Musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitra tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja". Kedua ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 ini tercantum dalam akad Musyarakah (MSA) di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yakni pada Pasal II Nomor 4, 5, 6 dan 7.

Dalam akad pembiayaan Musyarakah yang berlaku di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, terdapat pada Pasal II No 4 yang berbunyi "pihak II (dua) berhak untuk melakukan segala hal mengenai usahanya itu sesuai dengan ketentuan syar'i". Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa tiap nasabah berhak untuk mengatur aset Musyarakah dalam proses bisnis normal. Dalam Pasal II No 5 yang berbunyi "pihak I (satu) tidak ikut serta dalam mengelola manajemen usaha", hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan mengindikasikan bahwa nasabah (dalam hal ini Pihak I yaitu KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah) memberi wewenang kepada nasabah untuk mengelola aset serta melakukan kegiatan akad pembiayaan Musyarakah. Dalam Pasal II No 6 dan 7 yang berbunyi "pihak I (satu) melakukan pembinaan dan pengawasan usaha yang dikelola oleh pihak II (dua)" serta "pihak II (dua) berkewajiban untuk memberikan laporan atas usahanya itu setiap bulan kepada pihak I secara jujur dan benar". Kedua jenis akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah telah sinkron dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yakni nasabah memberi dan diberi wewenang untuk mengelola aset serta melakukan kegiatan akad pembiayaan Musyarakah dengan memperhatikan kepentingan nasabah tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja yaitu dengan memberikan pengawasan serta pembinaan yang dilakukan oleh Pihak I (KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah) dan melaporkan laporan usaha yang dilakukan oleh pihak II (nasabah) agar

tidak terjadi kelalaian serta kesalahan dan memperhatikan kepentingan nasabah yang lain (pemberi dana yakni KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah).

Ketentuan lain dalam pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat dalam Pasal II No 1 yang berbunyi “pembiayaan tersebut benar-benar hanya digunakan untuk membiayai modal usaha bagi pihak II berupa...(nama atau jenis usaha nasabah)”. Ketentuan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi “seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri”. Hal tersebut tertuang secara jelas dalam akad pembiayaan Musyarakah bahwa pembiayaan tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. Janwari, Yadi. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Wawancara dengan pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, Kamis, 6 Maret 2019, pukul 13:30
- Wawancara terkait Perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah.
- Yunus, Jamal Lulain. 2009. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Malang Press.